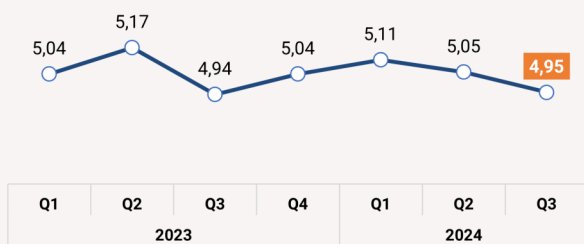


## Pertumbuhan Ekonomi Terkini dan Perkembangan Harga Komoditas, serta pengaruhnya terhadap capaian Kinerja APBN 2024

Realisasi pertumbuhan ekonomi Q3-2024 sebesar 4,95% (yoy) atau 5,03% (ctc). Pertumbuhan tersebut didorong aktivitas domestik yang relatif terjaga dengan aktivitas produksi yang masih tumbuh, mobilitas masyarakat yang juga meningkat dan realisasi investasi yang masih menguat. Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 2,55%, dengan indeks penjualan eceran riil tumbuh sebesar 4,99% (yoy). Realisasi Q3-2024, mencerminkan ketahanan perekonomian domestik dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)



Dari sisi pengeluaran, kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh peningkatan belanja pada restoran, hotel, serta kebutuhan transportasi dan komunikasi. Sementara itu, PMTB tumbuh seiring peningkatan investasi pada barang modal, terutama mesin dan peralatan. Di sisi lain, ekspor didorong oleh kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah (1) Industri Pengolahan, yang tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri; (2) Sektor Konstruksi, yang mendapat dukungan dari pembangunan infrastruktur pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta berbagai proyek lainnya; (3) Perdagangan Besar dan Eceran, karena peningkatan pasokan domestik dan impor; (4) Sektor Informasi dan Komunikasi karena peningkatan aktivitas telekomunikasi dan jasa teknologi informasi seiring dengan bertambahnya pengguna internet.

Kontraksi pada sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan yang semula tumbuh sebesar 69,09% pada Q2 (qtq) menjadi -22,04% pada Q3 (qtq), karena terjadi panen raya pada Q2 yang tidak terjadi di Q3 (seasonalitas). Efek yang sama juga terjadi pada sektor transportasi serta makanan dan minuman yang tumbuh tinggi pada Q2 namun mengalami perlambatan pada Q3-2024.

Selain itu, tingginya pertumbuhan sektor pertanian pada Q2-2024 juga berdampak pada terjadinya *over supply* pada stok daging terutama pascahari raya Idul Adha. Pada beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai merah serta buah-buahan yang turut mendorong harga pangan.

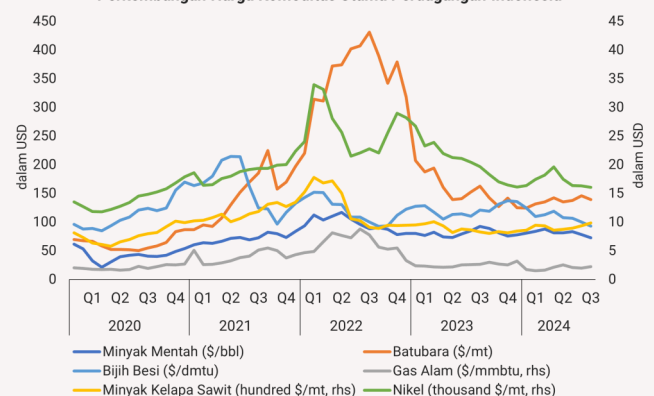
Meski terdapat pertumbuhan positif, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global seperti ketidakstabilan harga komoditas dan potensi resesi di negara mitra dagang utama. Namun, kebijakan ekonomi yang kondusif, termasuk inflasi yang terkendali, telah membantu menjaga daya beli masyarakat. Diharapkan, momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dengan memanfaatkan permintaan domestik yang kuat dan mengoptimalkan investasi pada infrastruktur, khususnya yang terkait proyek strategis nasional.

Pada tahun 2024, harga berbagai komoditas utama perdagangan Indonesia menunjukkan fluktuasi yang berbeda. Sebagian besar komoditas utama mengalami penurunan harga secara tahunan, pada Q3-2024 harga komoditas Bijih Besi -13,32%, Batu bara -7,29%, Nikel -20,39%, Gas Alam -18,79% dan Minyak Mentah -8,64%, hanya Minyak Kelapa Sawit yang mengalami peningkatan harga sebesar 9,44% (yoy).

Fluktuasi harga komoditas memiliki implikasi langsung pada stabilitas fiskal. Penurunan harga komoditas energi, terutama minyak, memengaruhi realisasi pendapatan dari sektor migas, sementara subsidi energi tetap perlu dijaga untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga. Hal ini membuat pemerintah harus meningkatkan strategi fiskal yang lebih fleksibel guna menyesuaikan dengan kondisi pasar global yang dinamis.

Kinerja APBN 2024 sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian dan perkembangan harga komoditas, terutama di sektor energi. Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang baik pada triwulan ketiga 2024 dengan pertumbuhan yang didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, serta konsumsi rumah tangga yang stabil. Namun, fluktuasi harga minyak dan batu bara berdampak langsung pada penerimaan negara dan subsidi energi yang dialokasikan pemerintah. Di tengah ketidakpastian global, melalui APBN Pemerintah Indonesia berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian belanja, optimalisasi pendapatan, serta penerapan surplus keseimbangan primer. Kebijakan ekonomi yang fokus pada stabilitas harga dan dukungan investasi, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja dan penurunan angka pengangguran, turut mendukung upaya Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan Harga Komoditas Utama Perdagangan Indonesia

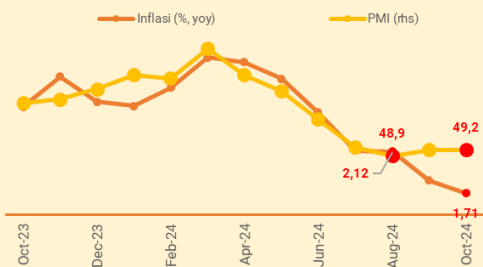


# Realisasi APBN

s.d. 31 Oktober 2024

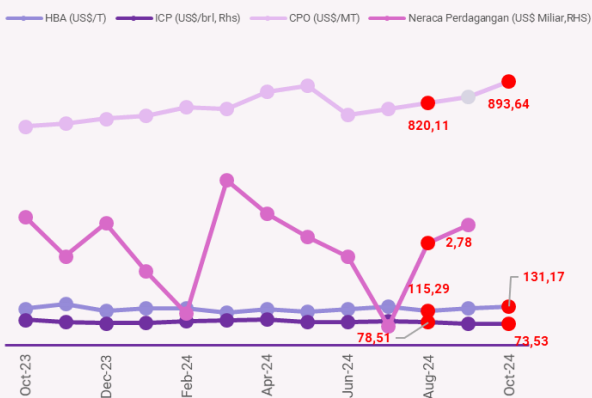
Uraian (triliun rupiah)	2023		2024						
	Growth y-o-y (%)	APBN	Real s.d. 31 Okt	% thd APBN	Growth y-o-y (%)	Growth m-o-m (%)	Growth m-t-m (%)		
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	▲ 2,8	2.802,3	2.247,5	80,2	▲ 0,3	▲ 11,8	▲ 3,4		
I. Penerimaan Perpajakan	▲ 2,5	2.309,9	1.749,3	75,7	▲ 0,3	▲ 13,9	▲ 3,3		
1. Penerimaan Pajak	▲ 5,3	1.988,9	1.517,5	76,3	▼ (0,4)	▲ 15,6	▲ 2,8		
2. Kepabeanan & Cukai	▼ (13,6)	321,0	231,7	72,2	▲ 4,9	▲ 4,3	▲ 6,6		
II. PNBP	▲ 3,8	492,0	477,5	97,1	▼ (3,4)	▼ (2,9)	▲ 2,6		
III. Hibah	▲ 124,9	0,4	20,7	4.804,1	▲ 1.405,0	▲ 2.051,0	▲ 22,0		
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	▼ (4,7)	3.325,1	2.556,7	76,9	▲ 14,1	▲ 4,0	▼ (4,9)		
I. Belanja Pemerintah Pusat	▼ (5,9)	2.467,5	1.834,5	74,3	▲ 16,7	▼ (3,5)	▼ (11,8)		
1. Belanja K/L	▲ 1,9	1.090,8	933,5	85,6	▲ 21,4	▲ 48,0	▲ 30,1		
2. Belanja non-K/L	▼ (12,4)	1.376,7	901,0	65,4	▲ 12,1	▼ (36,2)	▼ (40,1)		
II. Transfer Ke Daerah	▼ (1,6)	857,6	722,2	84,2	▲ 8,0	▲ 29,1	▲ 18,0		
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	▲ 153,3	(25,5)	97,1						
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT)</b>	▼ (99,9)	(522,8)	(309,2)						
<b>% thd PDB</b>		(2,29)	(1,37)						
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	▼ (62,1)	522,8	383,0	73,3	▲ 128,8	▲ 1.717,4	▼ (27,3)		

## Leading Indicators yang Berpengaruh terhadap Postur APBN



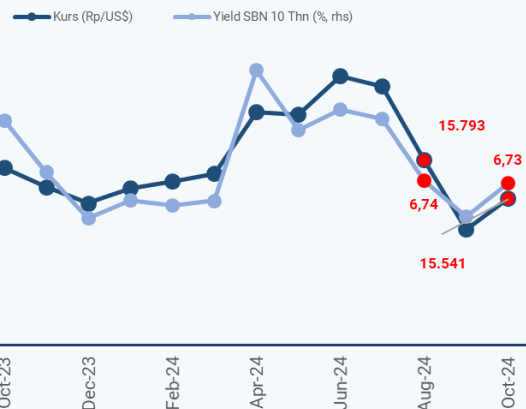
### Sektor Riil

Setelah terjadi deflasi dalam 5 bulan terakhir akibat komponen harga pangan, inflasi kembali terjadi di bulan Oktober 2024 antara lain dipengaruhi oleh berakhirnya musim panen raya beberapa komoditas. PMI manufaktur Indonesia kembali berada di zona kontraksi sejak Juli 2024, dipengaruhi oleh rendahnya aktivitas pasar dan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor.



### Sektor Eksternal

Terjadi kenaikan harga komoditas, terutama energi di bulan Oktober 2024. Harga minyak meningkat didorong oleh keputusan OPEC+ untuk menunda kenaikan produksi di bulan Desember seiring dengan pelemahan permintaan global. Sementara itu, harga batu bara juga mengalami peningkatan, dipengaruhi oleh peningkatan impor batu bara Tiongkok untuk pembangkit listrik dan industri kimia. Hal yang sama terjadi pada harga CPO yang dipicu oleh penurunan produksi Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh El Nino berkepanjangan di tahun 2023-2024.



### Sektor Keuangan

Mengalami tekanan pada bulan Oktober 2024 yang tercermin dari depresiasi nilai tukar rupiah dan kenaikan yield SBN 10 tahun Indonesia. Ketidakpastian pasar keuangan global tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi sektor domestik, terutama didorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga the Fed yang lebih moderat di tengah dinamika pemilu presiden AS. Risiko ini mendorong investor untuk mengalihkan dana mereka dari pasar negara berkembang, menyebabkan penguatan dolar AS dan kenaikan suku bunga SBN.

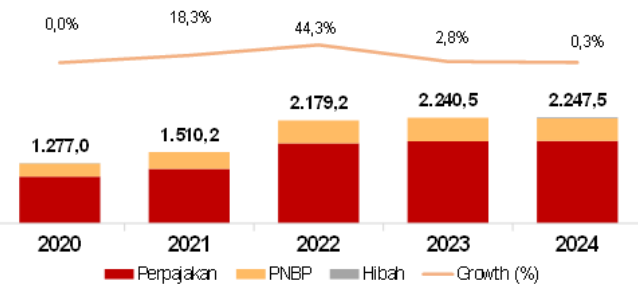
### Kinerja PPh Badan Bulan Oktober 2024 Meningkatkan Signifikan, Kepabeanaan dan Cukai Melanjutkan Penguatan

Kinerja Pendapatan Negara sampai dengan bulan Oktober 2024 telah mencapai Rp2.247,5 T atau tumbuh 0,3% yang dipengaruhi oleh perekonomian nasional, volatilitas harga komoditas, serta implementasi kebijakan pemerintah. Penerimaan perpajakan sebagai sumber penerimaan terbesar mencapai Rp1.749,3 T atau tumbuh 0,3% yang ditopang dari pajak maupun kepabeanaan dan cukai. Penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan mendekati arah positif. Hal ini didorong terjanjarnya tingkat konsumsi serta tekanan restitusi yang mulai menurun. Secara total, pajak masih melanjutkan tren perbaikan bulan sebelumnya, meskipun masih berkontraksi 0,4% yang dipengaruhi oleh penurunan laba tahun sebelumnya akibat moderasi harga komoditas tahun 2023 dan restitusi pada semester I tahun 2024.

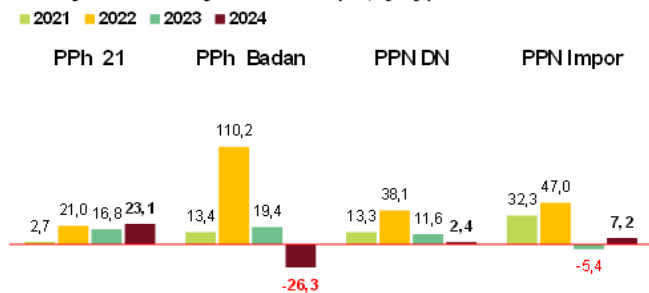
Sementara itu, Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai mampu tumbuh 4,9% yang berasal dari semua komponen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama peningkatan produksi rokok dengan dibarengi upaya pengendalian rokok ilegal, kebijakan relaksasi ekspor mineral, serta nilai impor dan kurs dolar AS terhadap rupiah.

Kinerja perpajakan secara detail dapat dilihat pada *dashboard*: <https://bit.ly/DashboardPerpajakanLentera>

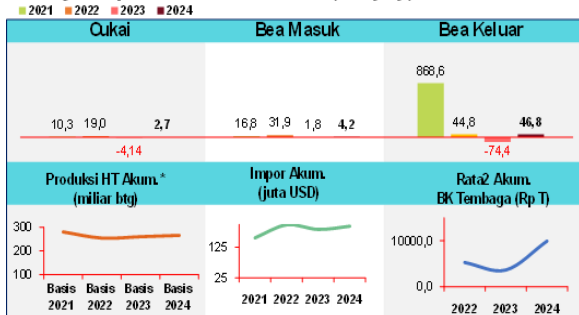
### Pendapatan Negara (Rp T)



### Kinerja Jenis Pajak Utama (% , yoy)

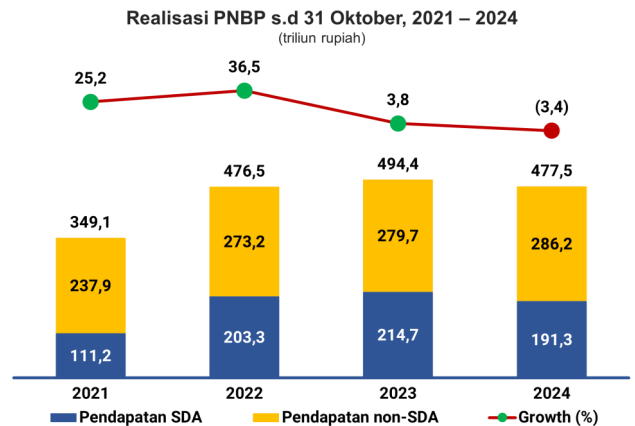


### Kinerja Kepabeanaan dan Cukai (% , yoy)



\* Basis produksi adalah perhitungan Nov des tahun sebelumnya dan Jan-Agust tahun berjalan

### Kinerja PNBP s.d 31 Oktober 2024 Masih Menghadapi Tekanan Pada Pendapatan SDA



Realisasi PNBP sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp477,5 T (97,1% dari APBN 2024), berkontraksi 3,4% (yoy). Perlambatan ini utamanya disebabkan oleh penurunan pendapatan SDA yang berkontraksi hingga 10,9% (yoy) dipengaruhi oleh turunnya ICP dan *lifting* migas serta dampak moderasi Harga Batubara Acuan (HBA), meskipun Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan Pendapatan BLU mengalami peningkatan.

Realisasi Pendapatan SDA Migas mencapai Rp93,9 T (85,2% dari APBN 2024), berkontraksi 4,0% (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya ICP dan *lifting* migas dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode Januari-September 2024, rata-rata *lifting* minyak bumi sebesar 574,4 ribu barel/hari (2023: 600,5 ribu barel/hari) dan rata-rata *lifting* gas bumi mencapai sebesar 969,9 ribu barel/hari (2023: 975,0 ribu barel/hari). Penurunan *lifting* ini disebabkan oleh penurunan tingkat alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Sementara itu, rata-rata ICP periode Januari-Oktober 2024 juga mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar US\$79,4/barel (2023: US\$78,6/barel).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp97,5 T (100,0% dari APBN 2024), berkontraksi 16,6% (yoy). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan SDA Pertambangan Minerba yang berkontraksi 18,6% (yoy) terutama disebabkan oleh turunnya kinerja penerimaan iuran royalti batu bara akibat moderasi HBA. Sementara itu, realisasi Pendapatan SDA Kehutanan tumbuh 14,3% (yoy) antara lain disebabkan pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan (Keterlanjuran Sawit) serta peningkatan pembayaran piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Realisasi Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 114,0% (yoy) terutama disebabkan oleh peningkatan volume produksi kapal perikanan dengan izin pusat. Peningkatan ini disebabkan karena seluruh kapal perikanan telah membayarkan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, sedangkan pada tahun 2023 yang merupakan masa transisi perubahan dari Praproduksi ke Pascaproduksi masih terdapat Surat Izin Penangkapan Ikan Praproduksi yang aktif. Selanjutnya, realisasi Pendapatan SDA panas bumi tumbuh 1,2% (yoy) disebabkan oleh peningkatan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) pada hampir seluruh Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) milik PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) dan Star Energy Geothermal Ltd. (SEG).

**Realisasi Pendapatan KND mencapai sebesar Rp79,7 T (92,8% dari APBN 2024), tumbuh 7,5% (yoy).** Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perbankan. Kenaikan dividen ini merupakan dampak dari meningkatnya pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan tahun 2023.

**Realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp125,0 T (108,5% dari APBN 2024), terkontraksi 6,4% (yoy).** Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang terkontraksi 21,7% (yoy) akibat moderasi HBA. Realisasi PNBP K/L juga tercatat mengalami kontraksi 1,6% (yoy) terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan Layanan pada beberapa K/L antara lain Kejaksaan, Kemenkominfo, serta Kementan. PNBP K/L dari pendapatan nonlayanan juga mengalami perlambatan utamanya pendapatan atas penempatan uang negara pada Bank Indonesia (BI) dan kontraksi Pendapatan atas Premium Obligasi Negara. Adapun Pendapatan *Domestic Market Obligation* (DMO) telah terealisasi sebesar Rp3,3 T (48,1% dari APBN 2024), tumbuh 23,2% (yoy).

**Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp81,6 T (97,9% dari APBN 2024), tumbuh 13,2% (yoy).** Pertumbuhan ini disumbang oleh Pendapatan BLU Nonsawit utamanya berasal dari peningkatan pendapatan jasa layanan rumah sakit, penerimaan kembali belanja modal BLU TAYL, pendapatan jasa layanan perbankan BLU, dan pendapatan jasa layanan pendidikan. Sementara itu, Pendapatan BLU Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) masih mengalami penurunan, dipengaruhi oleh turunnya rata-rata harga referensi CPO Kemendag yaitu sebesar \$823,4/mt pada periode Januari–Oktober 2024 (2023: \$845,6/mt).

### Hibah

**Penerimaan hibah mencapai Rp20,7 T, dipengaruhi terutama oleh penerimaan hibah dalam negeri** yang berasal dari pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah terutama untuk KPU dan Bawaslu sebagai bentuk dukungan Pilkada 2024.

## BELANJA NEGARA

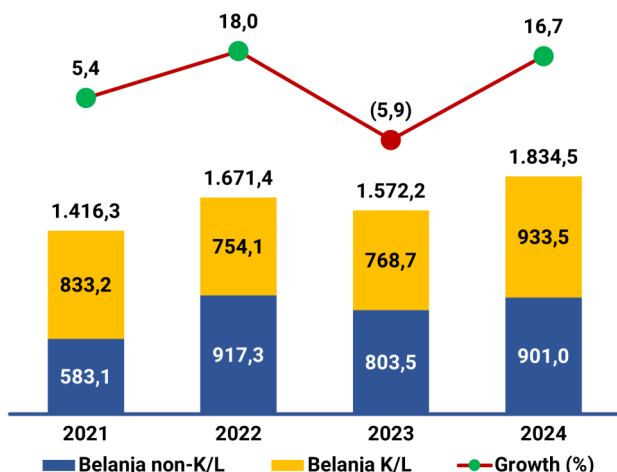
**Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 T (76,9% dari APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 T) atau tumbuh 14,1% (yoy). Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.834,5 T (74,3% dari APBN 2024) atau tumbuh 16,7% (yoy) serta Transfer ke Daerah sebesar Rp722,2 T (84,2% dari APBN 2024) atau tumbuh 8,0% (yoy).**

**Belanja Pemerintah Pusat utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat, pelaksanaan Pemilu, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan barang milik negara, pembayaran subsidi, pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri, dan pemenuhan kewajiban Pemerintah.**

**Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.834,5 T terdiri dari realisasi Belanja K/L dan Belanja Non-K/L. Realisasi Belanja K/L mencapai Rp933,5 T (85,6% dari APBN 2024) atau tumbuh 21,4% (yoy).** Belanja K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 ASN TNI/Polri, pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, penyaluran BOS, pembangunan infrastruktur, dan dukungan pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya, Realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp901,0 T (65,4% dari APBN 2024) atau tumbuh 12,1% (yoy). Belanja Non-K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, penyaluran subsidi, dan pembayaran kompensasi energi.

Adapun penjelasan kinerja Belanja K/L s.d. 31 Oktober 2024 berdasarkan jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

**Realisasi BPP s.d 31 Oktober, 2021 – 2024**  
(triliun rupiah)



**Realisasi Belanja Pegawai K/L mencapai Rp242,2 T (84,8% dari APBN 2024) atau tumbuh 13,4% (yoy),** utamanya dipengaruhi oleh pembayaran THR dan Gaji ke-13 ASN/TNI/Polri. Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp160,3 T dan komponen tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp81,9 T.

**Realisasi Belanja Barang K/L mencapai Rp351,2 T (86,7% dari APBN 2024) atau tumbuh 24,3% (yoy).** Peningkatan realisasi tersebut terutama kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024 dan penyaluran dana BOS. Selain itu, secara rinci realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pengadaan dan pemeliharaan alutsista dan nonalutsista, dan pelayanan kesehatan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan); (2) pembayaran honorarium pengawas Badan *Ad hoc*, pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang/jasa/logistik Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU); (3) preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, operasi dan pemeliharaan sarpras SDA dan penanggulangan darurat akibat bencana, serta penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR); (4) dukungan logistik/sarpras, pelaksanaan operasi kepolisian, pengembangan perbekalan umum, dan pelayanan keamanan bidang lintas oleh Polri; serta (5) penyaluran dana BOS, dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

**Realisasi Belanja Modal mencapai Rp218,0 T (88,1% dari APBN 2024) atau tumbuh 40,0% (yoy) yang dipengaruhi antara lain oleh peningkatan belanja infrastruktur KemenPUPR, dan pengadaan alutsista Kemenhan.** Kinerja realisasi Belanja Modal dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan rumah susun untuk ASN/TNI/Polri oleh KemenPUPR; (2) pengadaan sarana dan prasarana Kemenhan dan alutsista TNI; (3) pengadaan sarana dan prasarana serta Almitsus Polri; (4) pengadaan peralatan BIN; dan (5) pembangunan/ pengembangan fasilitas pelabuhan, bandara, serta sarana dan prasarana perkeretaapian oleh Kemenhub.

**Realisasi Bantuan Sosial K/L mencapai Rp122,0 T (80,1% dari pagu APBN 2024) atau tumbuh sebesar 4,5% (yoy) yang antara**

lain dipengaruhi oleh penyaluran bantuan PKH dan Kartu Sembako bulan September-Oktober 2024 melalui Himbara. Belanja bantuan sosial dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (2) penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,7 juta KPM; (3) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) penyaluran bantuan PIP bagi 17,2 juta siswa dan bantuan KIPK bagi 889,0 ribu mahasiswa; serta (5) pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.

**Adapun penjelasan kinerja Belanja Non-K/L s.d. 31 Oktober 2024 dapat disampaikan sebagai berikut. Pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp149,2 T, tumbuh 16,8% (yoy) yang dipengaruhi oleh pembayaran THR dan Gaji ke-13 Pensiunan ASN/TNI/Polri. Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp406,4 T (81,7% dari APBN 2024) atau tumbuh 11,0% (yoy). Kemudian, realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp211,9 T (74,1% dari APBN 2024) atau tumbuh 19,6% (yoy). Realisasi Belanja Subsidi tersebut terdiri atas: (1) Subsidi Energi sebesar Rp139,6 T, untuk penyaluran BBM bersubsidi sebesar 13,5 juta KL, LPG tabung 3 Kg sebesar 6,1 juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi sejumlah 41,3 juta pelanggan; dan (2) Subsidi Nonenergi sebesar Rp72,3 T terutama dimanfaatkan untuk Subsidi Bunga KUR kepada 4,3 juta debitur dan plafon penyaluran KUR sebesar Rp246,6 T, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan untuk 158,6 ribu unit rumah bersubsidi, serta penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 5,9 juta ton. Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp121,9 T (31,4% dari APBN 2024) atau berkontraksi sebesar 0,8% (yoy), utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran Kompensasi BBM dan Listrik sebesar Rp115,1 T serta pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebesar Rp4,2 T.**

### Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) s.d. 31 Oktober 2024 utamanya untuk mendukung pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah, serta dukungan pelaksanaan pelayanan publik a.l. pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

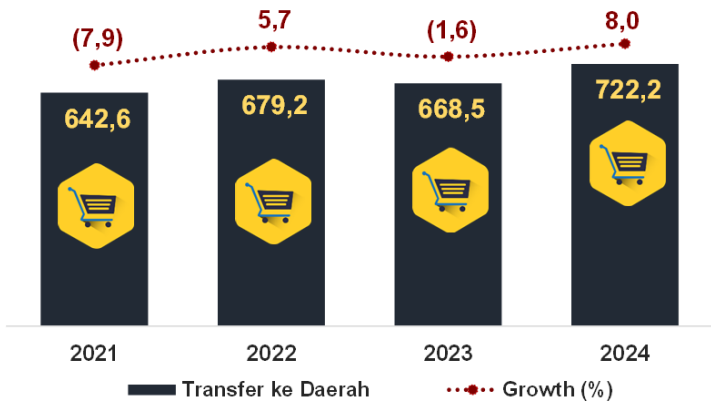
Sampai dengan 31 Oktober 2024 realisasi penyaluran TKD mencapai Rp722,2 T (84,2% terhadap APBN 2024), lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp668,5 T (82,1% terhadap APBN 2023). Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dalam memenuhi persyaratan penyaluran TKD.

Penyaluran DBH sampai dengan 31 Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp107,8 T (75,3% terhadap APBN 2024). Realisasi tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 6,0% (yoy) yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp31,4 T, DBH SDA sebesar Rp73,8 T, dan DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp2,6 T. Realisasi DBH tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh peningkatan alokasi DBH, serta kebijakan DBH *earmarked* untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan.

Realisasi penyaluran DAU sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp377,2 T (88,2% terhadap APBN 2024), lebih tinggi sebesar 9,1% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp345,8 T (87,3% terhadap

APBN 2023). Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran DAU *Block Grant* Rp313,7 T yang utamanya digunakan untuk pembayaran gaji ASN Daerah, serta penyaluran DAU *Specific Grant* sebesar Rp63,5 T antara lain untuk dukungan DAU untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, dan penggajian PPPK Daerah yang diangkat pada tahun 2024.

**Realisasi Penyaluran TKD s.d. 31 Oktober, 2021-2024 (triliun rupiah)**



**Realisasi penyaluran DAK sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp153,8 T (81,8% terhadap APBN 2024), lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp145,0 T (78,0% terhadap APBN 2023). Realisasi tersebut terdiri atas: (1) DAK Fisik sebesar Rp37,0 T atau 68,7% terhadap APBN 2024; (2) DAK Nonfisik sebesar Rp116,3 T atau 86,9% terhadap APBN 2024, antara lain meliputi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Tunjangan Guru ASN Daerah, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); serta (3) Hibah kepada Daerah sebesar Rp0,5 T atau 103,7% terhadap APBN 2024.**

Realisasi penyaluran Dana Otsus Aceh dan Otsus Provinsi-provinsi di wilayah Papua sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp11,0 T (60,2% terhadap APBN 2024), sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp11,7 T (67,9% terhadap APBN 2023). Realisasi tersebut dipengaruhi antara lain oleh kepatuhan pemerintah daerah penerima Otsus dalam menyampaikan dokumen syarat salur secara lengkap dan tepat waktu.

Realisasi penyaluran Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp1,14 T (80,0% terhadap APBN 2024). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1,09 atau 76,7% terhadap APBN 2023. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan Yogyakarta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta.

Realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp66,5 T (93,6% terhadap APBN 2024), lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp58,3 T (83,3% terhadap APBN 2023). Realisasi Dana Desa tersebut termasuk penyaluran BLT Desa sebesar Rp7,3 T bagi 2,53 juta KPM yang tersebar di sekitar 75 ribu desa.

Selanjutnya, Insentif Fiskal sampai dengan 31 Oktober 2024 telah tersalurkan sebesar Rp4,9 T (60,8% terhadap APBN 2024), lebih rendah dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp5,0 T (62,7% terhadap APBN 2023). Realisasi pemanfaatan Insentif Fiskal pada tahun 2024 ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah antara lain pada bidang infrastruktur, perlindungan sosial, dan dukungan dunia usaha.

## PEMBIAYAAN

Pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Oktober 2024 terealisasi sebesar Rp383,0 T atau 73,3% dari APBN 2024. Realisasi ini mengalami kenaikan 128,8% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Hal ini terutama diakibatkan oleh kenaikan dalam realisasi pembiayaan utang.

Pembiayaan utang sampai dengan 31 Oktober 2024 secara neto terealisasi sebesar Rp438,1 T. Realisasi pembiayaan utang tersebut naik 116,5% (yoy) diakibatkan adanya kenaikan realisasi penerbitan SBN (neto) dan realisasi pinjaman (neto).

Selanjutnya, terkait dengan realisasi pinjaman (neto), Pinjaman Dalam Negeri/PDN (neto) terdapat realisasi sebesar Rp5,6 T yang berasal dari penarikan PDN (bruto) Rp9,9 T dan pembayaran cicilan pokok PDN sebesar negatif Rp4,3 T. Sementara pada Pinjaman Luar Negeri/PLN (neto) terdapat realisasi sebesar Rp37,6 T yang berasal dari penarikan PLN (bruto) Rp111,9 T dan pembayaran cicilan pokok PLN sebesar negatif Rp74,3 T.

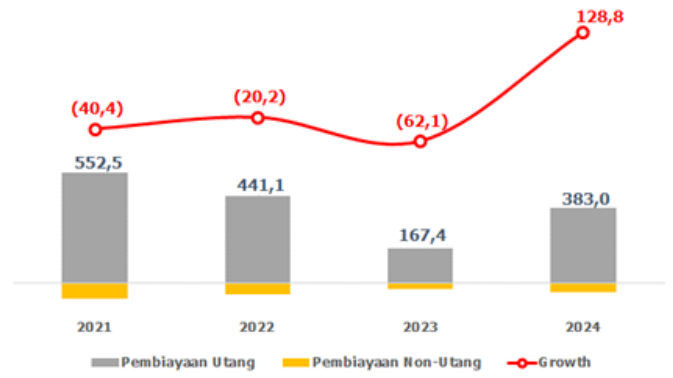
Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 31 Oktober 2024 adalah sebesar negatif Rp57,0 T. Realisasi tersebut digunakan untuk investasi kepada BUMN sebesar negatif Rp28,2 T, investasi kepada BLU sebesar negatif Rp22,5 T, investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional sebesar negatif Rp2,0 T, dan investasi Pemerintah non permanen sebesar negatif Rp13,7T serta tambahan dari cadangan investasi untuk investasi Pemerintah nonpermanen sebesar negatif Rp3,3 T. Selain itu, terdapat realisasi penerimaan kembali investasi sebesar Rp12,6 T yang berasal dari pembayaran cicilan pokok piutang dana bergulir eks-BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebesar Rp1,1 T, pinjaman PEN daerah sebesar Rp3,8 T, pembayaran cicilan pokok Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp0,2 T, dan pengesahan belanja Satuan Kerja Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang berasal dari Dana Rehabilitasi Mangrove sebesar Rp0,1 T.

Sampai dengan Oktober 2024 pemberian pinjaman telah terealisasi (neto) sebesar Rp1,3 T. Realisasi tersebut berasal dari realisasi penerusan pinjaman sebesar negatif Rp2,4 T (58,4% dari APBN 2024) dan realisasi penerimaan cicilan pokok penerusan pinjaman sebesar Rp3,8 T (96,1% dari APBN 2024).

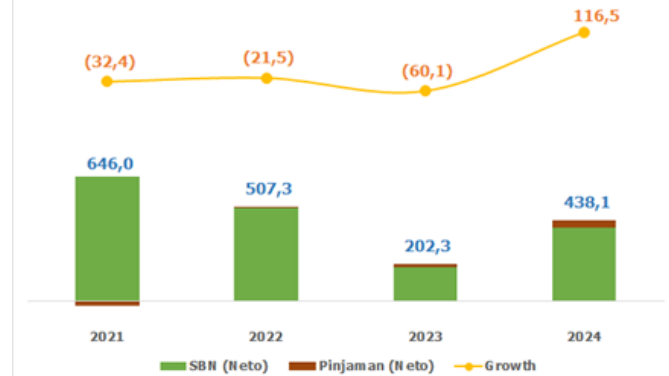
Sementara itu, alokasi anggaran kewajiban penjaminan sampai dengan 31 Oktober 2024 belum direalisasikan atau dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah, sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya, diantaranya karena mempertimbangkan prioritas realisasi anggaran. Adapun total saldo rekening tersebut saat ini sebesar Rp12,2 T, berasal dari pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan tahun-tahun sebelumnya. Rekening tersebut bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi risiko klaim atas jaminan Pemerintah.

Realisasi pembiayaan lainnya sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp0,6 T yang berasal dari hasil pengelolaan aset. Hasil pengelolaan aset merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Sementara itu, penggunaan SAL sampai dengan 31 Oktober 2024 belum direalisasikan.

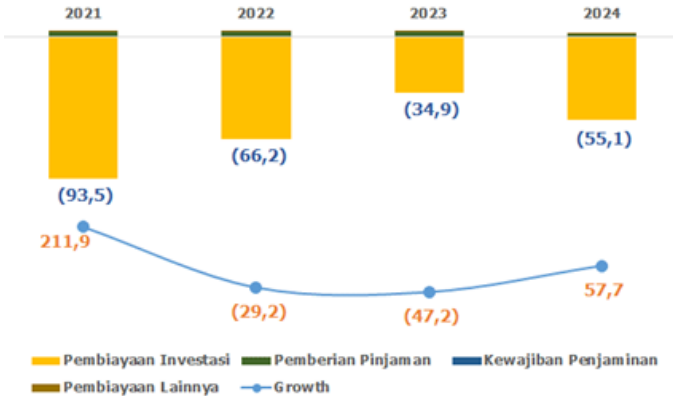
Realisasi Pembiayaan Anggaran s.d 31 Oktober, 2021-2024 (triliun Rupiah)



Realisasi Pembiayaan Utang s.d 31 Oktober, 2021-2024 (triliun Rupiah)



Realisasi Pembiayaan Non-Utang s.d 31 Oktober, 2021-2024 (triliun Rupiah)



## Workshop Penyusunan Dashboard APBN



- Penyelenggara** : Direktorat Penyusunan APBN. DJA
- Waktu** : Senin, 21 Oktober 2024, KPP Pratama Bekasi Utara
- Tempat** : Tim Penyusunan Dashboard APBN
- Peserta** : Agus Hekso Pramudijono (Widyaiswara Ahli Madya dari Pusdiklat Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK))

### Sekilas Hasil Pembahasan

**Data analitik dan visualisasi data menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam penyusunan APBN.** *Workshop* ini merupakan bagian dari rangkaian pembelajaran yang diadakan oleh Direktorat Penyusunan APBN, DJA, untuk meningkatkan kapabilitas pegawai dalam mengolah data dan membuat *dashboard* secara sederhana menggunakan aplikasi Excel. Dengan memanfaatkan *template* bahan paparan *Asset Liabilities Committee (ALCo)*, proses pengolahan data dapat dilakukan lebih cepat. Meskipun demikian, pengerjaan ini tetap memerlukan penyempurnaan struktur data pada setiap komponen. Tantangan seperti data tematik yang membutuhkan adaptasi dinamis juga menjadi topik menarik dalam *workshop* tersebut.

#### REDAKSI

**Direktorat Penyusunan APBN**  
 Gedung Sutikno Slamet  
 Jl. DR Wahidin No. 1  
 Jakarta Pusat  
 Telp: (021) 3849315  
 Email:  
 penyusunan.apbn@gmail.com

